

PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, PENGAWASAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN BOJONEGORO

Bernicha Irnadianis Ifada

Bernicha23@gmail.com

Lilis Ardini

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine and analyze the effect of accountability, transparency, supervision, and financial management on the financial performance of the Regional Apparatus Work Unit in Bojonegoro Sub-district. Moreover, the research was quantitative. The data collection technique used purposive sampling. The data were primary with questionnaires as the instrument. The questionnaires were distributed to respondents. In line with that, there were 60 respondents from 22 Regional Apparatus Work Units in Bojonegoro Sub-district. The independent variables were accountability, transparency, supervision, and financial management. While the dependent variable was financial performance. Furthermore, the testing instruments were validity and reliability tests. Additionally, the data analysis technique used multiple linear regression. The result concluded that accountability had a positive and significant effect on financial performance. However, transparency had an insignificant effect on financial performance. Likewise, supervision had an insignificant effect on financial performance. In contrast, financial management had a significantly positive effect on financial performance.

Keywords: accountability, transparency, supervision, management, performance.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi, pengawasan dan pengelolaan keuangan terhadap kinerja keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bojonegoro. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Jumlah responden dalam penelitian ini yaitu sebanyak 60 responden yang didapat dari 22 dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan, Pengelolaan Keuangan dan variabel terikatnya adalah Kinerja Keuangan. Pengujian instrumen menggunakan Uji Validitas dan Uji Reliabilitas. Metode analisis menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan, transparansi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan, pengawasan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan dan pengelolaan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.

Kata Kunci: akuntabilitas, transparansi, pengawasan, pengelolaan, kinerja

PENDAHULUAN

Adanya desentralisasi dan otonomi daerah yang di umumkan oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kemandirian serta daya saing setiap daerah dalam meningkatkan akuntabilitas dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Akuntabilitas publik yaitu pemberian informasi dan pengungkapan aktivitas serta kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Winarni, 2020). Secara praktis, akuntabilitas publik dapat digunakan sebagai alat atau sarana untuk menilai kinerja aparat pemerintah sehingga mereka dapat mengenali kekuatan serta kelemahannya (Indradi,

2017:25). Prinsip dari akuntabilitas publik yaitu melaporkan dan menyajikan kegiatan penyelenggaraan yang dapat di pertanggungjawabkan secara adil kepada pihak yang berhak atau memiliki wewenang atas hasil tersebut.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, keduanya dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2001 sebagai awal mula otonomi daerah. Namun seiring berjalannya waktu kedua Undang-Undang tersebut mengalami gangguan atau hambatan dari masyarakat dan dianggap tidak sesuai dengan tuntutan serta perkembangan sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia, politik maupun ketatanegaraan. Karena adanya tuntutan publik yang begitu besar maka pemerintah daerah melakukan revisi kedua Undang-Undang tersebut yang ditandai dengan disahkannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 mewajibkan Presiden dan Gubernur/Bupati/Walikota untuk menyampaikan laporan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang berbentuk Laporan Keuangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan tersebut berbentuk Laporan Pelaksanaan Anggaran (*Budgetary Reports*) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi pemeran utama dalam hal mengelola keuangan daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan salah satu bagian dari pemerintah yang melakukan fungsi pemerintah dan pelayanan publik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006). Tercapainya pengelolaan keuangan yang baik tidak lepas dari adanya pengawasan publik, pengawasan dilakukan langsung oleh atasan sebagai pengguna anggaran dan pengawasan yang dilakukan secara tidak langsung terhadap keuangan daerah yang dilakukan oleh Dewan yang meliputi pengawasan penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh lembaga legislatif (DPRD) terhadap lembaga eksekutif (pemerintah daerah) sangat penting dilakukan, karena pengawasan adalah suatu bentuk usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah (pusat) dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan transparansi (Taufik dan Safitri, 2021).

Saat ini banyak daerah yang menyusun laporan keuangan dengan format *top down* yang mengakibatkan laporan yang dihasilkan menjadi tidak kredibel karena tidak ada konsolidasi yang terbukti karena SKPD tidak menyerahkan laporan keuangan, terlambat menyerahkan keuangan maupun belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Masalah dalam penyusunan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sering terjadi adalah karena kurangnya pengetahuan dalam memahami sistem Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis *accrual* dan komprehensif. Padahal Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis *accrual* ini wajib diketahui dan dipahami oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD). Namun hal ini dapat diatasi dengan adanya pelatihan teknologi, selain itu juga dapat menghadirkan konsultan yang paham atau memiliki kemampuan dalam hal penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah sehingga dapat terjadi *transfer knowledge* secara langsung terhadap SKPD.

Berdasarkan penjelasan diatas terdapat perbedaan dan ketidakkonsistenan hasil penelitian akuntabilitas, transparansi, pengawasan dan pengelolaan keuangan terhadap kinerja keuangan. Perbedaan yang terdapat dengan peneliti sebelumnya berada pada jumlah objek, lokasi penelitian dan variabel penelitian. Objek penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Bojonegoro yang meliputi kepala dinas, kepala bagian keuangan serta staff keuangan. Dengan adanya fenomena yang dijelaskan diatas, peneliti mengambil judul penelitian "Pengaruh Akuntabilitas, Trnsparansi, Pengawasan dan Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bojonegoro".

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat rumusan masalah yang ada pada penelitian ini yaitu: (1) Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bojonegoro? (2) Apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bojonegoro? (3) Apakah pengawasan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bojonegoro? (4) Apakah pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bojonegoro. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji dan menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi, pengawasan dan pengelolaan keuangan terhadap kinerja keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bojonegoro.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) pada Lubis (2020) menyatakan bahwa Teori keagenan (*agency theory*) adalah sebuah kontrak antara seorang atau lebih yang disebut sebagai *principal* yang menunjuk pihak lain disebut agen untuk menjalankan tugas sesuai dengan kepentingan *principal*, yang mencakup pendelegasian beberapa kewenangan pengambilan keputusan kepada agen. Hubungan keagenan dari penelitian ini dapat dilihat dari hubungan organisasi pemerintah baik tingkat daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan seluruh aktivitas dan kegiatan kepada pihak yang diberikan amanah untuk menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya. Mardiasmo (2006:3) menyatakan akuntabilitas adalah suatu bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam bukunya Ellwood (1993) pada Mardiasmo (2004:21) menjelaskan 4 (empat) dimensi akuntabilitas yang harus dimiliki oleh organisasi sektor publik, meliputi Akuntabilitas kejujuran dan hukum, Akuntabilitas proses, Akuntabilitas program dan Akuntabilitas kebijakan.

Transparansi

Transparansi publik adalah suatu keterbukaan informasi kepada masyarakat dan informasi yang dapat diakses langsung oleh pengguna. Menurut Adisasmita (2011:39) transparansi melaksanakan adanya keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi dan kebijakan yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan atas informasi tersebut. Sedarmayanti (2007) mengemukakan tujuan transparansi adalah untuk membangun rasa saling percaya pemerintah dengan publik dimana pemerintah harus memberikan informasi yang akurat terutama yang berkaitan dengan permasalahan serta mekanisme dalam mengakses informasi yang relevan.

Pengawasan

Pengawasan bermakna proses pengukuran kinerja dan pengambilan tindakan untuk menjamin agar mendapatkan hasil yang sesuai serta menjamin segala sesuatu berjalan lancar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Mukarom dan Laksana, 2016:190). Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan kegiatan organisasi yang berguna untuk menjamin pekerjaan yang dilakukan apakah sudah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan dilakukan untuk memastikan apakah dalam proses pengelolaan dan pelaporan keuangan sudah berjalan sesuai dengan visi, misi, strategi, tujuan dan target operasional organisasi. Jika terdapat kegagalan pengelolaan keuangan dalam mencapai tujuan yang sudah direncanakan hal itu dapat terjadi sebab adanya penyimpangan atau kelemahan pada salah satu proses pengawasan.

Pengelolaan Keuangan

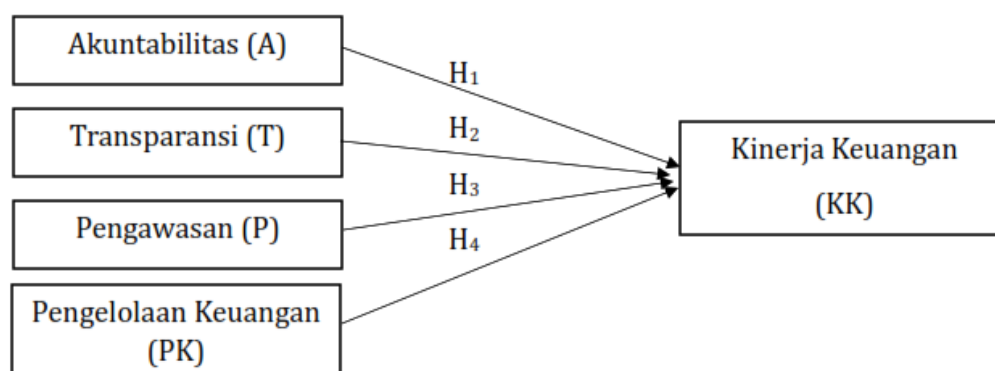
Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Halim, 2007:330). Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ini meliputi kekuasaan pengelolaan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Menurut Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 pasal 1 menyatakan pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD.

Rerangka Pemikiran

Hubungan antar variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1
Model Penelitian

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Keuangan

Akuntabilitas bertanggungjawab sebagai pihak yang memberikan, menyajikan,

melaporkan dan mengungkapkan seluruh aktivitas serta kegiatan secara bertanggung jawab terhadap pemegang amanah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas kegiatan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Pada hakekatnya akuntabilitas merupakan standar profesional yang digunakan oleh aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Untuk menciptakan pemerintahan yang baik maka pemerintah daerah diharapkan untuk dapat mempertanggungjawabkan anggaran daerah kepada masyarakat secara efektif dan efisien.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Novitasari dan Amanah (2020) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran. Kustihartiningih dan Riharjo (2021) juga menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pelayanan publik. Berdasarkan argumen teoritis dan hasil dari penelitian sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Karena pada dasarnya dalam melaksanakan kinerja keuangan dibutuhkan pertanggungjawaban dan keterbukaan untuk diperiksa agar dapat membangun efektivitas dan efisiensi. Berdasarkan penelitian sebelumnya, hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H₁: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan

Transparansi merupakan suatu prinsip yang dapat menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang telah dicapai. Prinsip transparansi memiliki 2 (dua) konsep yaitu: komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Adanya keberhasilan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah adalah pelaksanaan yang transparan, semakin terbuka suatu laporan keuangan pemerintah di masyarakat maka dapat dikatakan pemerintah berhasil dalam membuat suatu kebijakan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Novitasari dan Amanah (2020) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran. Kustihartiningih dan Riharjo (2021) juga menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pelayanan publik. Berdasarkan argumen teoritis dan hasil dari penelitian sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan penelitian sebelumnya, hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H₂: Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan

Pengawasan merupakan suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan, sasaran serta standar yang telah ditentukan. Pengawasan berfungsi untuk mengamati apa yang sebenarnya terjadi serta membandingkannya dengan dengan apa yang seharusnya terjadi. Apabila terdapat suatu penyimpangan atau hambatan dalam pelaporan laporan keuangan maka penyimpangan tersebut harus segera terdeteksi agar dapat diambil tindakan koreksi. Deteksi penyimpangan dalam pemerintah dapat digunakan sebagai suatu peringatan bagi pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan. Pengelolaan keuangan yang baik tidak terlepas dari peran pengawasan yang benar.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Setiyawan dan Safri (2016) menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh terhadap kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Bungo. Setiyaningrum (2017) juga menyatakan bahwa pengawasan

berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money. Berdasarkan argumen teoritis dan hasil dari penelitian sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan penelitian sebelumnya, hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H₃: Pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan menurut Syarifudin (2005:89) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam menggerakkan para pejabat yang bertugas dalam bidang keuangan untuk menggunakan fungsi-fungsi manajemen, meliputi perencanaan atau penganggaran, pencatatan, pengeluaran dan pertanggungjawaban. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat kepada masyarakat. Prinsip pengelolaan keuangan adalah efektif dan efisiensi yang mana pengeluaran anggaran daerah didasarkan pada proporsi kebutuhan program dan kegiatan daerah guna menghasilkan output atau income yang tanpa mengurangi pelayanan yang maksimal pada masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Hidayat (2015) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan argumen teoritis dan hasil dari penelitian sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan penelitian sebelumnya, hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H₄: Pengelolaan Keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Populasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang dapat dilakukan dengan cara menghitung, menganalisis, dan membandingkan data yang bertujuan untuk mengetahui hubungan korelasi maupun hubungan kasual antar variabel. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu kinerja keuangan, sedangkan akuntabilitas, transparansi, pengawasan dan pengelolaan keuangan sebagai variabel independennya. Populasi objek penelitian ini yaitu pihak internal yang bertanggung jawab atas keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. Menurut Sugiyono (2018:138) purposive sampling adalah pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti. Ukuran sampel menjadi penentu baik tidaknya sampel dapat diambil. Kriteria sampel yang akan digunakan yaitu aparat pemerintah yang meliputi kepala dinas, kepala keuangan dinas serta staff keuangan yang bekerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.

Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data yang diambil dalam penelitian ini menggunakan metode survei yang dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden yang masuk dalam kategori penelitian. Metode survei yang digunakan dalam penelitian ini menghasilkan data primer yang dapat digunakan oleh peneliti sebagai acuan dalam mengelola data untuk

pengujian hipotesis. Teknik pengumpulan data dilakukan pada 22 Kantor Dinas yang merupakan bagian dari SKPD di Kabupaten Bojonegoro dan responden dalam penelitian ini berjumlah 60 responden yang meliputi kepala dinas, kepala keuangan dinas serta staff keuangan.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian

Menurut Wiyono (2011), variabel merupakan apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai. Nilai bisa berbeda pada berbagai waktu untuk obyek atau orang yang sama, atau pada waktu yang sama untuk obyek atau orang yang berbeda. Penelitian ini menggunakan 4 (empat) variabel independen (akuntabilitas, transparansi, pengawasan dan pengelolaan keuangan) dan 1 (satu) variabel dependen (Kinerja keuangan SKPD) yang diukur berdasarkan skala likert. Skala likert merupakan skala psikometrik yang umum digunakan dalam angket dan termasuk skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei.

Definisi Operasional Variabel

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercaya untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Pengelolaan keuangan yang mengarah pada akuntabilitas dapat meningkatkan ekonomi, efisiensi dan efektifitas.

Transparansi

Transparansi merupakan perilaku yang memberikan keterbukaan kepada seluruh pihak-pihak yang berkepentingan, seperti masyarakat, pemegang saham, pengusaha, pemerintah dan seluruh pihak yang berkepentingan (Widyaningsih:2010).

Pengawasan

Pengawasan merupakan pemantauan perilaku, kegiatan atau informasi pada saat penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban laporan keuangan daerah. Kadarman (2001) menyatakan bahwa pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada rencana untuk merancang sistem umpan balik informasi untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya yang telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi.

Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan merupakan kegiatan yang dijalankan oleh pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang didalamnya mencakup perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.

Kinerja Keuangan

Menurut Mangkunegara (2012) kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang telah dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diamanatkan kepadanya.

Teknik Analisis Data

Teknis analisis data merupakan langkah yang penting dalam melakukan penelitian, karena dalam analisis data dapat menentukan kesimpulan yang dibuat dari penelitian

tersebut. Kegiatan dalam analisis data yaitu mengelola data berdasarkan variabel dan jenis responden, kemudian menafsirkan hasil analisis pengelolaan data yang sudah dilakukan. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti berpedoman dari data primer yang telah diperoleh dari hasil kuesioner yang sudah di isi oleh responden penelitian. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan software SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) yang meliputi:

Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2004:169) analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Teknik analisis yang digunakan untuk mendeskripsikan pertanyaan kuesioner yang sesuai dengan karakter responden berkaitan tentang variabel yang akan diteliti yang disajikan dalam bentuk tabel statistik deskriptif dalam SPSS.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Apabila suatu instrumen dalam penelitian dikatakan valid maka hal tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2013:168). Ghozali (2016:53) juga menentukan pengukuran uji validitas yaitu: 1) Jika r hitung $>$ r tabel maka pertanyaan dinyatakan valid. 2) Jika r hitung \leq r tabel maka pertanyaan dinyatakan tidak valid.

Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2002:135) Reliabilitas merupakan suatu indikator dari variabel atau konstruk yang digunakan sebagai alat untuk mengukur suatu kuesioner. Dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas adalah sebagai berikut: 1) Jika nilai Cronbach's Alpha $>$ 0,60 maka kuesioner atau angket dinyatakan reliabel atau konsisten. 2) Jika nilai Cronbach's Alpha $<$ 0,60 maka kuesioner atau angket dinyatakan tidak reliabel atau tidak konsisten.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Ghozali (2016:154) menyatakan bahwa, Uji normalitas digunakan untuk menguji model regresi linier pada variabel terikat dan variabel bebas, apakah variabel-variabelnya memiliki kontribusi normal atau tidak. Uji normalitas dengan menggunakan 2 (dua) cara yaitu: pertama dengan menggunakan analisis grafik normal *probability plot* (P-P Plot), Uji normalitas grafik P-Plot memiliki syarat bahwa distribusi data penelitian diharuskan mengikuti garis diagonal antara 0 serta pertemuan sumbu X dan sumbu Y. Kedua menggunakan *One Sample Kolmogrov-Smirnov Test* dengan ketentuan berdasarkan taraf signifikasinya diatas 0,05 menunjukkan distribusi normal. dan sebaliknya jika nilai signifikasinya dibawah 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas memiliki tujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukannya adanya korelasi antar variabel independen (bebas). Menurut Ghozali (2002:57) untuk mendeteksi terjadi atau tidaknya multikolinearitas dalam suatu penelitian dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Model regresi yang bebas dari multikolinearitas memiliki nilai VIF $<$ dari 10, dan angka *tolrance* $>$ 0,10.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksesuaian varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2006:69). Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas dengan menggunakan tabel *plot* atau *scatterplot*. Apabila titik-titik dalam grafik membentuk pola yang menyebar diatas dan dibawah angka nol sumbu Y maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas (Ghozali, 2016:134).

Analisis Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan metode analisis yang digunakan untuk mengukur dan mengetahui hubungan variabel dependen dan variabel independennya. Analisis ini dilakukan pada saat suatu penelitian terdapat minimal 2 (dua) variabel independennya. Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengukur hubungan antara dua variabel atau lebih yang menunjukkan apakah masing - masing variabel bebas berpengaruh positif atau negatif terhadap variabel terikat (Ghozali, 2016:93). Model persamaan yang digunakan dalam regresi linear berganda yang dikembangkan dalam penelitian ini yaitu:

$$KK = \alpha + \beta_1A + \beta_2T + \beta_3P + \beta_4PK + e$$

Pengujian Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Analisis uji koefisien dterminasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan tentang variasi-variasi variabel independen, sedangkan sisanya dapat dijelaskan dalam faktor-faktor lain diluar model. Nilai koefisien determinasi nilainya berada diangka nol dan satu. Jika nilai (R²) memiliki nilai 0 atau mendekati 0 maka kemampuan variabel - variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas tetapi jika nilai (R²) memiliki nilai 1 atau mendekati 1 maka variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi-variabel dependen (Ghozali, 2016:95).

Uji Kelayakan (Uji F)

Menurut Ghozali (2016:96) uji statistik f merupakan langkah awal untuk mendeteksi model regresi yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen atau tidak. Uji kelayakan dilakukan untuk menunjukkan model regresi yang sudah layak untuk diolah lebih lanjut sebagai estimasi untuk menjelaskan pengaruh variabel akuntabilitas, transparansi, pengawasan dan pengelolaan keuangan terhadap kinerja keuangan. Pengujian kelayakan menggunakan taraf nilai signifikan 5%, dengan kriteria signifikan $\alpha = 5\%$ yaitu: 1) Jika nilai signifikan $F < 0,05$ maka, model regresi dikatakan layak untuk digunakan. 2) Jika nilai signifikan $F > 0,05$ maka, model regresi dikatakan tidak layak untuk digunakan.

Uji Hipotesis (Uji t)

Menurut Ghozali (2016:97) uji t dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji hipotesis (Uji t) digunakan untuk mengetahui masing-masing variabel antara variabel independen dengan variabel dependen. Pengujian uji t ini menggunakan kriteria $\alpha = 0,05$ sebagai berikut: 1) Jika tingkat signifikan uji $t > 0,05$ maka, hipotesis ditolak dan dapat diartikan bahwa variabel dependen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel independen. 2) Jika tingkat signifikan uji $t < 0,05$ maka, hipotesis diterima dan dapat diartikan bahwa variabel dependen berpengaruh signifikan terhadap variabel independen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif merupakan pengujian yang digunakan untuk menyajikan data yang terdiri dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai minimum dan nilai maksimum yang ada pada variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu akuntabilitas, transparansi dan pengawasan sebagai variabel independen, kinerja keuangan sebagai variabel dependen dan pengelolaan keuangan sebagai variabel moderasi. Dibawah ini merupakan hasil pengujian analisis statistik deskriptif:

Tabel 1
Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Akuntabilitas	60	16	25	21.87	2.696
Transparansi	60	15	25	21.92	2.506
Pengawasan	60	16	25	21.42	2.196
Pengelolaan Keuangan	60	17	25	22.22	2.256
Kinerja Keuangan	60	16	25	20.98	2.266
Valid N (listwise)	60				

Sumber: Data Primer, Diolah 2023

Hasil dari pengujian analisis statistik deskriptif pada tabel 1 menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas memiliki kualitas jawaban nilai minimum responden sebesar 16, nilai maksimum sebesar 25, dengan rata-rata sebesar 21.87 dan standar deviasi sebesar 2.696. Variabel transparansi memiliki kualitas jawaban nilai minimum responden sebesar 15, nilai maksimum sebesar 25, dengan rata-rata sebesar 21.92 dan standar deviasi sebesar 2.506. Variabel pengawasan memiliki kualitas jawaban nilai minimum responden sebesar 16, nilai maksimum sebesar 25, dengan rata-rata sebesar 21.42 dan standar deviasi sebesar 2.196. Variabel pengelolaan keuangan memiliki kualitas jawaban nilai minimum responden sebesar 17, nilai maksimum sebesar 25, dengan rata-rata sebesar 22.22 dan standar deviasi sebesar 2.256. Sedangkan variabel kinerja keuangan memiliki kualitas jawaban nilai minimum responden sebesar 16, nilai maksimum sebesar 25, dengan rata-rata sebesar 20.98 dan standar deviasi sebesar 2.266.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur penelitian yang valid harus diukur dengan seharusnya apabila r hitung $>$ r tabel maka pertanyaan dinyatakan valid. Sebaliknya, jika hitung $<$ r tabel maka pertanyaan dinyatakan tidak valid. Hasil uji validitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	R hitung	R tabel	Keterangan
Akuntabilitas	X1.1	0,844	0,254	Valid
	X1.2	0,840	0,254	Valid
	X1.3	0,798	0,254	Valid
	X1.4	0,747	0,254	Valid
	X1.5	0,822	0,254	Valid
Transparansi	X2.1	0,771	0,254	Valid
	X2.2	0,854	0,254	Valid
	X2.3	0,837	0,254	Valid
	X2.4	0,738	0,254	Valid
	X2.5	0,658	0,254	Valid
Pengawasan	X3.1	0,492	0,254	Valid
	X3.2	0,554	0,254	Valid
	X3.3	0,755	0,254	Valid
	X3.4	0,727	0,254	Valid
	X3.5	0,596	0,254	Valid
Pengelolaan Keuangan	X4.1	0,778	0,254	Valid
	X4.2	0,846	0,254	Valid
	X4.3	0,770	0,254	Valid
	X4.4	0,833	0,254	Valid
	X4.5	0,663	0,254	Valid
Kinerja Keuangan	Y1	0,734	0,254	Valid
	Y2	0,694	0,254	Valid
	Y3	0,710	0,254	Valid
	Y4	0,736	0,254	Valid
	Y5	0,638	0,254	Valid

Sumber: Data Primer, Diolah 2023

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel 2 diatas menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan kuesioner yang dibagikan kepada responden memiliki nilai korelasi positif yang lebih besar dari R tabel 0,254. Hal ini dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh dari pengujian validitas dinyatakan valid dan dapat dilakukan pengujian data lebih lanjut.

Uji Reliabilitas

Penelitian ini harus dilakukan uji reliabilitas dengan tujuan untuk mengukur konsisten atau tidaknya kuesioner dalam penelitian. Menurut Ghazali (2005) dalam bukunya (Nunnally, 1960), suatu variabel dikatakan reliabel apabila memberikan nilai *Cronbach's Alpha* > 0.60.

Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas

Model	Cronbach's Alpha	N Of Item
Akuntabilitas	0.851	5
Transparansi	0.828	5
Pengawasan	0.575	5
Pengelolaan Keuangan	0.829	5
Kinerja Keuangan	0.711	5

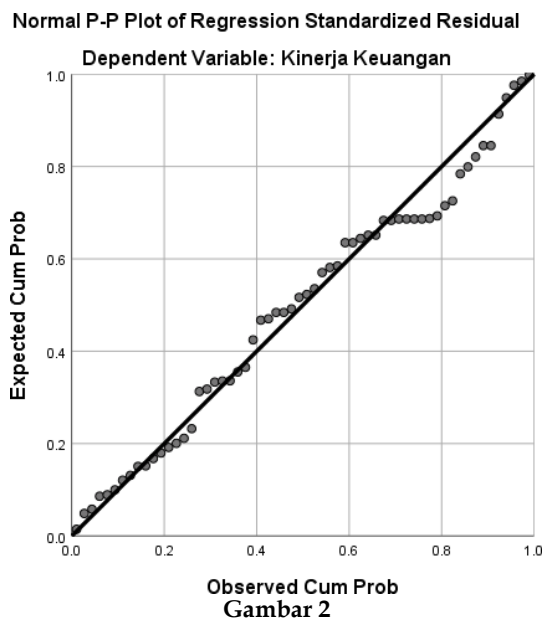
Sumber: Data Primer, Diolah 2023

Berdasarkan tabel 3 diatas hasil dari uji reliabilitas pada variabel akuntabilitas memiliki nilai *Cronbach's Alpha* 0,851. Variabel transparansi memiliki nilai *Cronbach's Alpha* 0,828.

Variabel pengawasan memiliki nilai *Cronbach's Alpha* 0,575. Variabel pengelolaan Keuangan memiliki nilai *Cronbach's Alpha* 0,829 dan variabel Kinerja Keuangan memiliki nilai *Cronbach's alpha* 0,711.

Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan dengan tujuan untuk menguji variabel dependen dan variabel independen memiliki distribusi normal atau tidak. Hasil uji normalitas menggunakan pendekatan grafik *probability plot* dan pendekatan *kolmogorov-smirnov* dapat dilihat dibawah ini:



Gambar 2
Uji Normalitas Grafik P-Plot
Sumber: Data Primer, diolah 2023

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa titik-titik pada garis diatas menyebar mengikuti arah garis diagonal disekitar garis diagonal. Hal ini dapat dinyatakan bahwa model regresi pada penelitian ini sudah memenuhi asumsidan berdistribusi secara normal.

Tabel 3
Hasil Uji Statistik Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.53878034
Most Extreme Differences	Absolute	.101
	Positive	.101
	Negative	-.066
Test Statistic		.101
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data Primer, diolah 2023

Hasil penelitian dengan menggunakan uji kolmogorov-smirnov pada tabel 12 dapat diketahui nilai signifikan (Asymp. Sig 2- Tailed) sebesar $0.200 > 0.05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini data yang digunakan sudah memenuhi asumsi dan berdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi pada penelitian ini ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (bebas), untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas. Uji multikolinearitas dalam model regresi pada penelitian ini dapat dilihat dari *tolerance value* atau *Variance Inflation Factor (VIF)*. Apabila nilai *tolerance* $\leq 0,10$ atau nilai *VIF* ≥ 10 , maka model regresi terjadi multikolinieritas.

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a
 Collinearity statistics

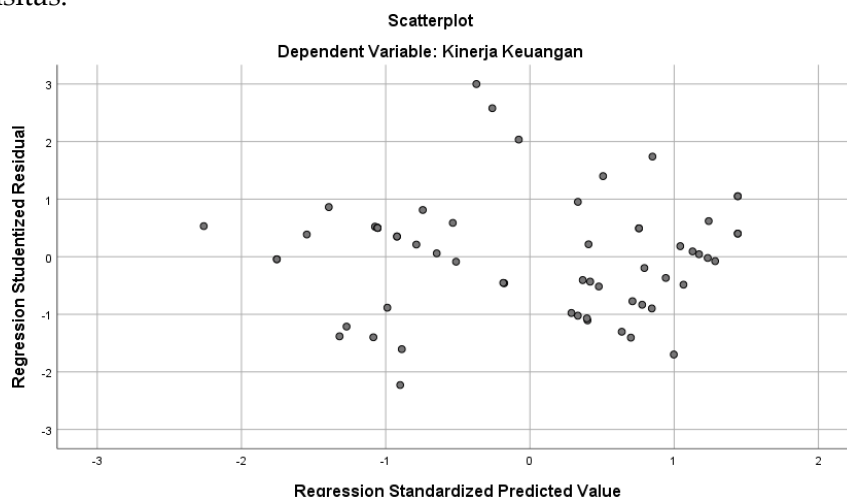
Model	Tolerance	VIF
Akuntabilitas	.445	2.246
Transparansi	.443	2.257
Pengawasan	.543	1.840
Pengelolaan Keuangan	.476	2.102

Sumber : Data Primer, diolah 2023

Berdasarkan hasil pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai *tolerance* pada semua variabel $> 0,10$ dan nilai *VIF* pada semua variabel < 10 . Maka dapat dikatakan bahwa model regresi pada penelitian ini sudah memenuhi asumsi dan tidak terdapat masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan pengujian yang digunakan dengan tujuan untuk mengetahui apabila suatu model regresi terjadi ketidaksamaan antar satu pengamatan dengan pengamatan yang lain (Ghozali, 2011). Berikut ini merupakan hasil dari uji heteroskedastisitas.



Gambar 3
Uji Heteroskedastisitas
 Sumber: Data Primer, diolah 2023

Berdasarkan gambar hasil uji heteroskedastisitas diatas dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar secara acak diatas dan dibawah angka 0 dan tidak berkumpul membentuk suatu pola tertentu. Hal ini dapat disimpulkan bahwa modelregresi dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi dan tidak terdapat heteroskedastisitas.

Analisis Linier Berganda

Regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari 1 (satu) variabel independen. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil analisisregresi linear berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5
Hasil uji Analisis Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized		Standardized		
	Coefficients		Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	3.728	2.311		1.613	.112
Akuntabilitas	.309	.115	.368	2.682	.010
Transparansi	.037	.124	.041	.299	.766
Pengawasan	.112	.128	.108	.872	.387
Pengelolaan Keuangan	.328	.133	.326	2.458	.017

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Sumber: Data Primer, diolah 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa model persamaan analisis regresi linear berganda sebagai berikut:

$$KK = 3,728 + 0,309A + 0,037T + 0,112P + 0,328PK + e$$

Berdasarkan tabel hasil analisis regresi linear berganda diatas, dapat diketahui bahwa nilai konstanta dalam penelitian ini adalah 3,728. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi, pengawasan dan pengelolaan keuangan terhadap kinerja keuangan sebesar 3,728. Dan berdasarkan tabel hasil analisis regresi linear berganda diatas, dapat diketahui bahwa nilai koefisien regresi akuntabilitas, transparansi, pengawasan dan pengelolaan keuangan memiliki nilai yang positif. Sehingga dapat dikatakan akuntabilitas, transparansi, pengawasan dan pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Pengujian Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji analisis koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur dan mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menjabarkan variasi variabel independen, sedangkan faktor lain dijabarkan diluar model (Ghozali, 2016).

Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)
Model

Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.734 ^a	.539	.505	1.594

a. Predictors: (Constant), Pengelolaan Keuangan, Pengawasan, Akuntabilitas, Transparansi

Sumber: Data Primer, diolah 2023

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 6 diatas dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R-Square sebesar 0,505 atau 50,5% sehingga dapat diartikan bahwa variabel independen akuntabilitas, transparansi, pengawasan dan pengelolaan keuangan dapat mempengaruhi kinerja keuangan sebagai variabel dependen sebesar 50,5% dan sisanya 49,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji kelayakan model dilakukan untuk menunjukkan model regresi yang sudah layak untuk diolah lebih lanjut sebagai estimasi untuk menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian kelayakan model menggunakan taraf signifikan 5%, dengan tingkat kriteria signifikan $\alpha = 5\%$ yaitu: 1) Jika nilai signifikan $F < 0,05$ maka, model regresi dikatakan layak untuk digunakan. 2) Jika nilai signifikan $F > 0,05$ maka, model regresi dikatakan tidak layak untuk digunakan. Hasil pengelolaan uji kelayakan (uji F) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7
Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	163.280	4	40.820	16.071	.000 ^b
	Residual	139.703	55	2.540		
	Total	302.983	59			

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

b. Predictors: (Constant), Pengelolaan Keuangan, Pengawasan, Akuntabilitas, Transparansi

Sumber: Data Primer, diolah 2023

Berdasarkan hasil perhitungan uji kelayakan model (uji F) pada tabel 7 diatas dapat diketahui bahwa terdapat nilai F sebesar 16,071 dengan tingkat nilai signifikan sebesar 0,000 $< 0,05$ ($\alpha = 5\%$) maka nilai regresi yang disajikan dalam tabel diatas layak untuk digunakan. Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel akuntabilitas, transparansi, pengawasan dan pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji hipotesis (Uji t) dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing masing variabel antara variabel independen dengan variabel dependen. Pengujian uji t ini menggunakan tingkat kriteria $\alpha = 0,05$ sebagai berikut: 1) Jika tingkat signifikan uji $t > 0,05$ maka, hipotesis ditolak dan dapat diartikan bahwa variabel dependen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel independen. 2) Jika tingkat signifikan uji $t < 0,05$ maka, hipotesis diterima dan dapat diartikan bahwa variabel dependen berpengaruh signifikan terhadap variabel independen. Hasil pengelolaan uji hipotesis (uji t) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 8
Hasil Uji Hipotesis (Uji t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized		Standardized		
	<u>efficients</u> B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	3.728	2.311		1.613	.112
Akuntabilitas	.309	.115	.368	2.682	.010
Transparansi	.037	.124	.041	.299	.766
Pengawasan	.112	.128	.108	.872	.387
Pengelolaan Keuangan	.328	.133	.326	2.458	.017

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Sumber: Data Primer, diolah 2023

Dari tabel 8 diatas hasil uji t menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut: (1) Pengujian hipotesis akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, dibuktikan dengan tingkat signifikansi sebesar $0,010 < 0,05$, maka hipotesis pertama (H_1) diterima. (2) Pengujian hipotesis transparansi publik berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan, dibuktikan dengan tingkat signifikansi sebesar $0,766 > 0,05$, maka hipotesis kedua (H_2) ditolak. (3) Pengujian hipotesis pengawasan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan, dibuktikan dengan tingkat signifikansi sebesar $0,387 > 0,05$, maka hipotesis ketiga (H_3) ditolak. (4) Pengujian hipotesis pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran, dibuktikan dengan tingkat signifikansi sebesar $0,017 < 0,05$, maka hipotesis keempat (H_4) diterima.

Pembahasan

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil uji t yang dilakukan pada penelitian ini akuntabilitas memiliki nilai t hitung sebesar 2,682 dengan nilai signifikan sebesar 0,010. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki nilai positif dan nilai signifikan kurang dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima yang artinya akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pada dinas SKPD di Kabupaten Bojonegoro. Akuntabilitas dapat berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan memiliki arti bahwa apabila kinerja keuangan pemerintah daerah berjalan dengan baik dalam organisasi pemerintah tersebut. Seseorang yang memiliki sifat akuntabilitas yang baik maka kinerja yang dilakukan dalam sebuah organisasi juga semakin baik hal ini dapat menimbulkan efektifitas serta efisiensi dalam tata kelola pemerintah menjadi semakin meningkat. Akuntabilitas dapat dikatakan baik terjadi jika organisasi pemerintah dapat menjalankan hukum serta peraturan yang berlaku. Pengukuran kinerja yang berdasarkan alokasi biaya dan pelayanan menekankan pada tiga elemen utama antara lain ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah Kabupaten Bojonegoro harus tetap meningkatkan dan mempertahankan prinsip akuntabilitas sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu bertanggung jawab terhadap hasil kinerja keuangan agar dapat menjadi pemerintah yang lebih baik lagi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Amin, *et al.*, (2022) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Saraswati dan Suhartini (2022) yang menyatakan akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep *Value For*

Money. Serta penelitian yang dilakukan oleh Yassir, *et al.*, (2022) yang menyatakan akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Enrekang. Namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Jitmau, *et al.*, (2017) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Permata, *et al.*, (2022) yang menyatakan akuntabilitas berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap daya serap anggaran. Dan penelitian dari Hajaningrum dan Ardini (2019) yang menyatakan akuntabilitas keuangan berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil uji t yang dilakukan pada penelitian ini transparansi memiliki nilai t hitung sebesar 0,299 dengan nilai signifikan sebesar 0,766. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi memiliki nilai positif dan nilai signifikan lebih dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_2 ditolak yang artinya transparansi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pada dinas SKPD di Kabupaten Bojonegoro. Transparansi dapat berpengaruh positif dengan kinerja keuangan memiliki arti bahwa apabila kinerja keuangan dalam pemerintah daerah baik maka hal itu dapat dipengaruhi oleh transparansi anggaran yang baik dalam organisasi tersebut. Kebijakan dalam menyusun laporan keuangan dibuat oleh pemerintah untuk menentukan keberhasilan organisasi, oleh sebab itu semakin transparan kebijakan tersebut maka akses informasi yang dapat diketahui oleh publik semakin mudah. Transparansi yang baik dapat disebabkan karena adanya komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan publik atau masyarakat dengan cara mengomunikasikan melalui media massa secara terbuka yang dapat berupa tv, koran maupun artikel. Namun dalam penelitian ini transparansi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini disebabkan karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengetahui proses pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, padahal BPKAD Kabupaten Bojonegoro sudah menyediakan informasi berupa website yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang enggan untuk mengakses mengenai transparansi pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Bojonegoro baik melalui media elektronik maupun media lain. Hal ini juga dapat disebabkan karena kurangnya informasi untuk mengakses website tersebut jadi banyak masyarakat yang tidak mengerti bagaimana cara mengakses website tersebut. Ada tidaknya transparansi tidak akan mempengaruhi kualitas kinerja keuangan pemerintah daerah. Karena transparansi menjadi hal yang wajib ada pada sektor publik, harus mampu mengelola sumber daya publik yang membutuhkan informasi secara terbuka dan kemudahan dalam mengaksesnya. Jadi variabel transparansi tidak dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Bojonegoro ini disebabkan karena kurangnya partisipasi masyarakat dan juga kurangnya informasi tentang bagaimana cara mengakses website tentang laporan keuangan daerah di Kabupaten Bojonegoro yang sudah disediakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Binawati dan Badriyah (2022) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Ismiati dan Asyikin (2021) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Serta penelitian yang dilakukan oleh Permata, *et al.*, (2022) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap daya serap anggaran. Namun penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Novitasari dan Amanah (2020) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja anggaran. Penelitian yang dilakukan oleh Anggrayeni, *et al.*, (2021) yang menyatakan transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Serta penelitian yang dilakukan oleh Kushartiningsih dan Riharjo (2021) yang menyatakan transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pelayanan publik.

Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil uji t yang dilakukan pada penelitian ini pengawasan memiliki nilai t hitung sebesar 0,872 dengan nilai signifikan sebesar 0,387. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan memiliki nilai positif dan nilai signifikan lebih dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_3 ditolak yang artinya pengawasan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pada dinas SKPD di Kabupaten Bojonegoro. Pengawasan dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan dapat berarti bahwa apabila kinerja keuangan tersebut baik maka hal itu dipengaruhi oleh pengawasan yang baik dalam organisasi pemerintah daerah tersebut. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui apa yang terjadi apakah sudah sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi. Apabila terdapat penyimpangan dalam suatu laporan keuangan maka hal tersebut diharapkan dapat dikendalikan serta dapat dilakukan koreksi. Namun dalam penelitian ini pengawasan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini dapat disebabkan karena semakin tingginya tingkat pengawasan yang dilakukan akan menyebabkan pegawai maupun pimpinan merasa tertekan dalam menjalankan tugas. Tekanan dapat membuat seseorang menjadi gugup dan tidak tenang dalam melakukan aktivitasnya karena mereka merasa selalu diawasi. Sebaiknya agar dapat bekerja secara maksimal pengawasan dilakukan secara wajar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi variabel pengawasan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Bojonegoro disebabkan karena tingginya pengawasan yang dilakukan oleh pengawas yang menyebabkan pegawai merasa tertekan sehingga tidak dapat bekerja dengan baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Qodri (2018) yang menyatakan pengawasan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja pegawai. Pengawasan yang dilakukan oleh Noufal dan Dewi (2021) yang menyatakan pengawasan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja pegawai pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Tanggamus. Namun penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Candra, *et al.*, (2021) yang menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Purnomo dan Putri (2018) yang menyatakan pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money* pada SKPD di Kota Bandung. Serta penelitian yang dilakukan oleh Elda, *et al.*, (2016) yang menyatakan bahwa pengawasan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah berkonsep *value for money* pada pemerintahan Kota Malang.

Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil uji t yang dilakukan pada penelitian ini pengelolaan keuangan memiliki nilai t hitung sebesar 2,458 dengan nilai signifikan sebesar 0,017. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan memiliki nilai positif dan nilai signifikan kurang dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_4 diterima yang artinya pengelolaan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pada dinas SKPD di Kabupaten Bojonegoro. Pengelolaan keuangan adalah unsur dari tata usaha keuangan daerah yang berperan penting dalam proses keuangan daerah secara menyeluruh. Maka dari itu untuk melaksanakan pengelolaan keuangan yang baik maka masing-masing pihak yang bertanggung jawab dalam kinerja keuangan perlu merancang laporan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keuangan. Pengelolaan keuangan yang berorientasi pada kinerja menunjukkan akuntabilitas kinerja yang saling berkaitan antara tujuan yang ingin dicapai dengan jumlah dana yang dialokasikan. Adanya pengelolaan keuangan dapat meningkatkan kinerja suatu instansi pemerintah dengan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas wewenangnya masing-masing secara efektif dan efisien. Sehingga dengan adanya pengelolaan keuangan yang baik dapat mendorong terwujudnya kinerja keuangan pemerintah daerah yang lebih berkualitas dan dapat terbebas dari korupsi. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah Kabupaten

Bojonegoro harus tetap meningkatkan dan mempertahankan dalam proses Pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dapat menjadi pemerintah yang lebih baik lagi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kromen, *et al.*, (2023) yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Cottalismewati, *et al.*, (2022) yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Serta penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2015) yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Namun hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Syawie, *et al.*, (2017) yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Ireeuw, *et al.*, (2019) yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Serta penelitian yang dilakukan oleh Sartika (2020) yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan data penelitian berjumlah 22 dinas SKPD di Kabupaten Bojonegoro dengan teknik pengumpulan data survei terhadap 60 responden. Sehingga peneliti mampu melakukan penelitian mengenai pengaruh akuntabilitas, transparansi, pengawasan dan pengelolaan keuangan terhadap kinerja keuangan di SKPD di Kabupaten Bojonegoro. Maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut: 1) Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan H_1 sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi dan semakin kuat akuntabilitas maka akan semakin berpengaruh terhadap hasil kinerja keuangan pada dinas SKPD di Kabupaten Bojonegoro. Hal ini dapat menunjukkan bahwa akuntabilitas yang tinggi sangat menunjang kinerja keuangan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 2) Transparansi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan H_2 sehingga dapat disimpulkan bahwasemakin tinggi dan semakin kuat transparansi maka tidak berpengaruh terhadap hasil kinerja keuangan pada dinas SKPD di Kabupaten Bojonegoro. Hal ini disebabkan karena masyarakat di Kabupaten Bojonegoro masih enggan untuk mengakses website yang telah disediakan. Selain itu kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat tentang tata cara mengakses dapat menunjukkan bahwa transparansi yang tinggi belum tentu dapat menunjang kinerja keuangan. 3) Pengawasan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan H_3 sehingga dapat disimpulkan bahwasemakin tinggi dan semakin kuat pengawasan maka tidak berpengaruh terhadap hasil kinerja keuangan pada dinas SKPD di Kabupaten Bojonegoro. Hal ini dapat menunjukkan bahwa pengawasan yang tinggi belum tentu dapat menunjang kinerja keuangan dalam rangka mencapai tujuan organisasi karena tingginya pengawasan juga dapat menyebabkan karyawan merasa tertekan dalam melakukan pekerjaannya. 4) Pengelolaan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan H_4 sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin baik dan semakin kuat pengelolannya maka akan semakin berpengaruh terhadap hasil kinerja keuangan pada dinas SKPD di Kabupaten Bojonegoro. Hal ini dapat menunjukkan tingginya pengelolaan keuangan sangat menunjang kinerja keuangan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas maka terdapat saran-saran yang berguna untuk penelitian selanjutnya sebagai bahan pertimbangan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, antara lain: 1) Untuk Pemerintah daerah, diharapkan lebih meningkatkan kinerja keuangan dalam hal pertanggungjawaban, pelaporan dan pengawasan laporan keuangan agar lebih baik lagi. 2) Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan tidak hanya menggunakan variabel akuntabilitas, transparansi, pengawasan dan pengelolaan keuangan terhadap kinerja keuangan melainkan dapat menggunakan variabel lain seperti perencanaan, partisipasi masyarakat, desentralisasi fiskal, sistem akuntansi keuangan dan lain sebagainya. 3) Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah jumlah objek atau memperluas objek penelitian seperti menggunakan seluruh SKPD yang beradadi Kabupaten Bojonegoro.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Amin, M., Maryadi. Dan Sjarlis, Sylvia. 2022. Pengaruh Pengawasan Keuangan, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Anggaran. *Nobel Management Review* 3 (03).
- Anggrayeni, R. L. S., Wawo, A, dan Jannah R. 2021. Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Sifat Amanah Sebagai Variabel Moderasi. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review* 2 (2).
- Binawati, E., dan Badriyah, N. 2022. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Magelang. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia STIE Wisya Wiwaha* 2 (01): 32-49.
- Candra, I. 2021. Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada OPD di Kota Solok). *Jurnal Ekonomia* 12 (01). Maret 2022.
- Cottalismewati., Asmeri, R. dan Silvera, D. L. 2022. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. *Pereso Jurnal* 4 (01): 149-168.
- Elda, N. 2020. Pengaruh Pengawasan Keuangan dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Kinerja Pemerintah Berkonsep Value For Money Pada Pemerintah Kota Malang. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)* 8 (01).
- Ghozali, I. 2002. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 22*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi Kedelapan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hajaningrum, E, A. dan Ardini, L. 2021. Analisis Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pengendalian Internal dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Kinerja. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 10 (01).
- Halim, A. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Salemba Empat. Jakarta.
- Hidayat, R. 2015. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja

- Perangkat Daerah di Kabupaten Padang Pariaman). *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang* 3 (01).
- Indradi, S. S. 2017. *Etika Birokrasi dan Akuntabilitas Pemerintahan*. Cetakan Pertama. Intrans Publishing, Malang.
- Ireeuw, S, V, M., Layuk, P, K, A., dan Rante, A. 2019. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Jayapura). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah* 14 (01): 87-99.
- Ismiati dan Asyikin, J. 2021. Analisis Pengaruh Pengawasan Fungsional, Akuntabilitas Publik, Transparansi dan Peningkatan Pelayanan Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing* 16 (02).
- Jitmau, F., Kalangi, L., dan Lambey, L. 2017. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Fungsi Pemeriksaan Intern Kinerja Terhadap Pemerintah Daerah (Studi Empiris di Kabupaten Sorong). *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"* 8 (01).
- Kadarman. 2001. *Sistem Pengawasan Management*. Pustaka Quantum. Jakarta
- Kusnartiningsih, R. dan Riharjo, I, B. 2021. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 10 (03).
- Kromen, M. L. B., Manafe, H. A., dan Perseveranda, M. E. 2023. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 4 (04).
- Lubis, V. Z. F. 2020. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Anggaran dengan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Pemoderasi pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Tesis*. Program S2 Universitas Sumatera Utara. Sumatera Utara,
- Mangkunegara, A. P. 2012. *Evaluasi Kinerja SDM*. Refika Utama. Bandung.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- _____. 2006. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- _____. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana *Good Governance*. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* 2 (1).
- Mukarom, H. dan Laksana, M, W. 2016. *Membangun Kinerja Pelayanan Publik*. Edisi Revisi. Salemba Empat. Jakarta.
- Noufal, M, F. dan Dewi, A, R. 2021. Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanggamus. *Jurnal Relevansi: Ekonomi, Manajemen dan Bisnis* 5 (01).
- Novitasari, D., dan Amanah, L. 2020. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Publik Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(11).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. 15 Mei 2006. Berita Negara. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. 22 Oktober 2010. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000. *Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000. Jakarta.
- Permata, N., Rahayu, S dan Yudi. 2022. Pengaruh Perencanaan, Transparansi, Akuntabilitas dan Pengawasan Terhadap Daya Serap Anggaran Satuan Kerja Di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Jambi Dengan Gaya Kepemimpinan

- Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Jambi* 7 (02): 105-117.
- Purnomo, B, S. dan Putri, C. 2018. Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan dan Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 6 (3): 4667-476.
- Qodri, I, H., Pongtulurn, Y., dan Syaharuddin, Y. 2018. Pengaruh Pengawasan dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Perhubungan Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Manajemen Mulawarman* 3 (04).
- Saraswati, N, P, A., dan Suhartini, D. 2022. Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money. *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 6 (2). September 2022.
- Sartika, D. 2020. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Pada BPKAD Kota Padang). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas* 22 (02).
- Sedarmayanti. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Setiyawan, H, E. dan Safri, M. 2016. Analisis Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bungo. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah* 4(01): 2338-4603.
- Setiyaningrum, I. 2017. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Dengan Konsep Value For Money Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Yogyakarta. *Jurnal Profita Edisi 3 Tahun 2017*.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Ketujuh. Alfabeta. Bandung.
- _____. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- _____. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung.
- Syarifudin. 2005. *Administrasi Pembiayaan Pendidikan*. Pustaka Setia. Bandung.
- Taufiq, T. dan Safitri, D. 2021. Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial Dimoderasi Pengawasan Internal. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis* 14 (01).
- Undang-Undang Republik Inconesia Nomor 22 Tahun 1999. *Pemerintahan Daerah*. Januari 2001. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Inconesia Nomor 25 Tahun 1999. *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Januari 2001. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003. *Keuangan Negara*. 05 April 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Nomor 4286. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Inconesia Nomor 33 Tahun 2004. *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta.
- Widayanti, W., Priyadi M, P., dan Ardini, L. 2019. Akuntabilitas dan Transparansi Pada Laporan Keuangan Partai (Studi Kasus Pada Kantor DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur). *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 22 (2).
- Widyastuti, D, C, dan Ardini, L. 2019. Akuntabilitas Pengelolaan Dana PRODAMAS Pemerinrah Kota Pocanan, Kediri, Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 7(6).
- Widyaningsih, S, A, D. 2010. Transparansi Dalam Pembuatan Laporan Keuangan. *www.compas.com*. 25 Mei 2023.
- Winarni, E. D. 2020. Strategi Pemberdayaan Kelembagaan Desa: Studi Kasus di Desa Nagarawangi, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. *Jurnal Ilmiah Perlindungan & Pemberdayaan Sosial* 2(1).
- Wiyono, G. 2011. *Merancang Penelitian Bisnis dengan Alat Analisis SPSS 17.0 & Smart PLS 2.0*. Percetakan STIM YKPM. Yogyakarta.

Yassir., Mursalim, dan Junaid, A. 2022. Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan Keuangan dan Transparansi Anggaran Terhadap Pengelolaan Keuangan. *YUME: Journal of Management* 5 (2): 477-494.